

**DOKUMEN
LAPORAN EVALUASI
PENGUKURAN KINERJA
TRIWULAN I TAHUN 2024
KECAMATAN BANJARNEGARA**



**PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
KECAMATAN BANJARNEGARA**
Jl.Raya Argasoka Km.2 Telp./Fax. (0286) 591015
BANJARNEGARA
e-mail kec_banjarnegara@banjarnegarakab.go.id

KATA PENGANTAR

Dengan memanajatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kenikmatan kepada kita sekalian, pelaksanaan penyusunan dan pembuatan Dokumen Laporan Evaluasi Pengukuran Kinerja Tahun 2024 Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara, sebagai pelaksanaan dari Permenpan RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Dokumen Laporan Evaluasi Pengukuran Kinerja Tahun 2023 Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara merupakan evaluasi internal terhadap pengukuran kinerja setiap triwulan.

Dokumen Laporan Evaluasi Pengukuran Kinerja Tahun 2024 Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara ini disusun untuk mengungkapkan secara obyektif tentang hasil kinerja berdasar target dan realisasi yang dicapai yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023- 2026

Demikian Dokumen Laporan Evaluasi Pengukuran Kinerja Tahun 2023 Kecamatan Banjarenagara Kabupaten Banjarnegara disusun, dengan harapan dapat untuk menjadi tolok ukur kinerja dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Banjarnegara April 2024



NIP. 19690203 199901 2 002

**LAPORAN EVALUASI PENGUKURAN KINERJA
TRIWULAN I TAHUN 2024
KECAMATAN BANJARNEGARA KABUPATEN BANJARNEGARA**

Pelaksanaan kegiatan pada Kecamatan Banjarnegara telah berlangsung selama 3 (tiga) bulan yaitu bulan Januari sampai dengan Maret 2024 yang berarti telah memasuki Triwulan I. Berdasarkan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja tahun 2024 maka perlu dilakukan evaluasi guna diperoleh informasi mengenai pencapaian target beserta kendala dan solusi sehingga target tahunan yang telah ditetapkan dapat dicapai.

Capaian Kinerja sesuai dengan Indikator Kinerja Kecamatan Banjarnegara

Adapun capaian kinerja Triwulan I pada Kecamatan Banjarnegara dapat dijelaskan sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET DAN REALISASI 2024		
				TARGET TAHUNAN	TARGET S/D TW I	REALISASI S/D TW I
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk urusan kewilayahan.	Nilai SAKIP Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	72,40	15	15
			1. Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	25	25
			2. Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	25	25
			3. Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	25	25
2	Meningkatnya Efektifitas dan Transparansi Layanan Publik untuk urusan kewilayahan	Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	83,4	-	-
			1. Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	100%	25	25
			2. Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	100%	25	25

Pengukuran dan pencapaian kinerja masing-masing sasaran strategis dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran1 :

Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah untuk urusan Kewilayahan.

Pemerintah yang akuntabel diwujudkan dengan keseimbangan antara dokumen perencanaan kinerja ,pengukuran kinerja ,pelaporan kinerja ,evaluasi internal dan pencapaian sasaran/kinerja organisasi..Dokumen yang telah disusun sampai dengan Triwulan I Tahun 2024 berupa RKA, DPA, Rencana Kerja, Perjanjian Kinerja, Laporan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan seperti : CALK (Akuntansi), BMD (Aset), Simbarsada (Aset) dan dokumen dalam rangka penilaian kinerja pada Kecamatan Banjarnegara. Dokumen dokumen tersebut digunakan dalam rangka mendukung akuntabilitas kinerja yang akan dilakukan evaluasi oleh Inspektorat Kabupaten Banjarnegara.

A. Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan 1 (satu) kegiatan dan 6 (enam) Sub Kegiatan yakni :

1. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - a. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa dengan Indikator Sub Kegiatan Jumlah desa tertib Administrasi Umum dan jumlah desa tertib Administrasi Kependudukan
 - b. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Pendayagunaan Aset Desa dengan Indikator Sub Kegiatan Jumlah tertib Administrasi Keuangan
 - c. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pembangunan Desa dengan Indikator Sub Kegiatan Jumlah desa Tertib Administrasi Keuangan

- e. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan Indikator Sub Kegiatan Jumlah Desa Tertib Administrasi Umum
- f. Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan Indikator Sub Kegiatan Jumlah Desa Tertib Administrasi Lainnya
- g. Koordinasi Pendampingan Aset Desa, dengan indikator Sub Kegiatan Jumlah Desa Administrasi Umum
- h. Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

B. Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

Pada Indikator Program ini terdapat beberapa Kegiatan yang masing – masing kegiatan memiliki Sub Kegiatan dan masing – masing Sub Kegiatan memiliki Indikator Sub Kegiatan antara lain :

- 1. Kegiatan Admnistrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan Indikator Sub Kegiatan Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang terpenuhi
 - b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan Indikator Sub Kegiatan Jumlah Bahan Logistik Kantor yang terpenuhi
- 2. Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik dengan Indikator Sub Kegiatan Jumlah Jas Komunikasi Sumber Daya Air Listrik yang terpenuhi

- b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan Indikator Sub Kegiatan Jumlah Jasa Administrasi Perkantoran yang terbayarkan
3. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Dinas, Operasional Lapangan dengan Indikator Sub Kegiatan Jumlah Kendaraan Dinas, Pajak Kendaraan Dinas yang terpelihara dan terbayarkan pajaknya
 - b. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan Indikator Sub Kegiatan Gedung Kantor yang terpelihara
 - c. Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan Indikator Sub Kegiatan Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang terpelihara

C. Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan,

dengan 1 (satu) kegiatan dan 4 (empat) Sub Kegiatan yakni :

1.Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

- a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
- b. Pembangunan Sarana dan Prasana Kelurahan dengan Indikator Sub Kegiatan Jumlah Sarana dan Prasaran yang di bangun.
- c. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dengan Indikator Sub Kegiatan Jumlah Kelompok Masyarakat yang di bina
- d. Evaluasi Kelurahan dengan Indikator Sub Kegiatan Jumlah Laporan Evaluasi Kelurahan yang dilaksanakan

D. Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum,

dengan 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan yakni :

1.Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

- a. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan dengan Indikator Sub Kegiatan Jumlah tugas Forkompinca yang terlaksana

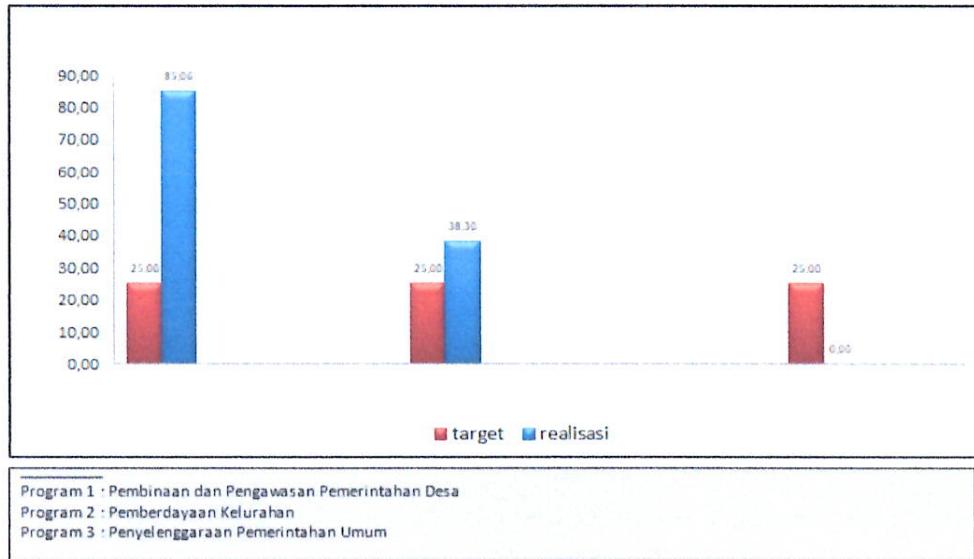
Anggaran Pelaksanaan Kegiatan

Anggaran yang mendukung sasaran strategis pada Triwulan I ini sebesar Rp 1.012.852.314 dengan realisasi Rp. 371.000.050 atau 36,62 % didukung dari 3 Program yaitu sebagaimana dalam table di bawah ini :

PROGRAM DAN ANGGARAN YANG MENDUKUNG PENGUKURAN KINERJA
 TRIWULAN PERTAMA (JANUARI S/D MARET)TAHUN 2023
 KECAMATAN BANJARNEGARA

NO	PROGRAM	TARGET ANGGARAN	REALISASI	PROSENTASE (%)
1	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	Rp 29.955.300	Rp 25.479.250	85,06
2	PROGRAM PEMERINTAHAN DESA			
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN KELURAHAN	Rp 982.897.014	Rp 376.501.800	38,30
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERIBATAHAN UMUM	Rp 3.600.000	Rp -	0,00
	JUMLAH TOTAL	Rp 1.012.852.314	Rp 401.981.050	39,68

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat di gambarkan dalam grafik untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari masing – masing program pada triwulan ke tiga, sebagaimana berikut :



Terhadap table dan grafik tersebut diatas masih terdapat beberapa kelemahan atau keberhasilan yang menjadi penyebab target tidak tercapai dan yang telah tercapai , diantaranya sebagai berikut :

a. Program Pembinaan dan Pengawasan Masyarakat Desa

Kelemahan :

Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan di sebabkan olehadanya penyesuaian terhadap aplikasi baru terkait SIPD Penatausahaan Keuangan karena aplikasi juga belum sempurna ,

Upaya yang di lakukan :

Pada Triwulan kedua akan terus di upayakan untuk semua operator agar terus belajar untuk menyesuaikan dengan aplikasi baru ,

b. Program Pemberdayaan Kelurahan

Pada Triwulan Pertama Program Pemberdayaan Kelurahan belum mencapai target kinerja ,.

Upaya yang dilakukan :

atas ketercapaian target ini karena target kinerja mempengaruhi pencairan Anggaran DAU terikat, akan terus di usahakan pada triwulan ke dua, karena sebagian besar anggaran kas pada triwulan ke dua.

c. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Kelemahan :

Serapan Keuangan tidak terlaksana sesuai perencanaan. karena anggaran telah digunakan untuk SPJ kegiatan yang lain, sehingga program urusan pemerintahan umum , yang berupa honor forkompinca akan di cairkan triwulan berikutnya.

Upaya yang di lakukan :

Pada Triwulan kedua akan di tingkatkan koordinasinya kepada pihak – pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut agar kegiatan terlaksana sesuai perencanaan, dan Anggaran terserap sesuai dengan jadwal pelaksanaan.

Sasaran 2	Meningkatnya Efektifitas dan Transparansi Layanan Publik untuk urusan Kewilayahannya
------------------	---

Sasaran Strategis Meningkatnya Efektifitas dan Transparansi Layanan Publik untuk urusan kewilayahannya dengan 1(satu) indikator Kinerja sasaran yaitu Nilai SKM Kecamatan Adapun target dan realisasi kinerja pada sasaran ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai SKM Kecamatan

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat atau Indeks Kepuasan Masyarakat adalah Informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif atas pendapat masyarakat pengguna jasa dalam memperoleh pelayanan dari aparatur pemerintah dalam hal ini kecamatan Banjarnegara. Kegiatan ini belum terlaksana atau target masih 0 % karena pengukuran

dilaksanakan pada bulan Agustus 2024 Untuk mengukur capaian kinerja ini dilakukan pengukuran kinerja melalui indikator kinerja program, adapun realisasi dari masing masing indikator kinerja sebagai berikut:

I. Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

Pada Indikator Program ini terdapat beberapa Kegiatan yang masing – masing kegiatan memiliki Sub Kegiatan dan masing – masing Sub Kegiatan memiliki Indikator Sub Kegiatan antara lain :

A. Kegiatan Admnistrasi Keuangan Perangkat Daerah

1. Penyediaan Gaji dan Tunjang ASN dengan Indikator Sub Kegiatan Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayarkan.
2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD dengan Indikator Sub Kegiatan Jumlah Jasa Administrasi Keuangan yang terbayarkan.dengan sub kegiatan Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD. Dengan Indikator Sub Kegiatan berupa Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

B. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan indikator Sub Kegiatan Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan indikator jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD

C. Kegiatan Admnistrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan Indikator Sub Kegiatan Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan
- b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan Indikator Sub Kegiatan Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan

D. Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik dengan Indikator Sub Kegiatan Jumlah Jas Komunikasi Sumber Daya Air Listrik yang disediakan.
- b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan Indikator Sub Kegiatan Jumlah Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan.

E. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Dinas, Operasional Lapangan dengan Indikator Sub Kegiatan Jumlah Kendaraan Dinas, Operasional atau Lapangan yang di pelihara dan di bayar pajak perijinananya.
- b. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan Indikator Sub Kegiatan Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan yang di rehabilitasi/ terpelihara
- c. Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan Indikator Sub Kegiatan Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terpelihara.

F. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

- a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan Indikator Sub Kegiatan Jumlah unit sarana dan prasarana Gedung kantor dan bangunan lainnya yang di sediakan.
- b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan Indikator Sub Kegiatan Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan
- c. Pengadaan Mebel dengan Indikator Sub Kegiatan Jumlah unit mebel yang disediakan
- d. Pengadaan Aset tetap Lainnya dengan Indikator Sub Kegiatan Jumlah unit Aset tetap lainnya yang disediakan
- e. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan Indikator Sub Kegiatan Jumlah unit sarana dan prasarana Pendukung Gedung kantor dan bangunan lainnya yang di sediakan.

5. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjang ASN dengan Indikator Sub Kegiatan Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayarkan.
- b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD dengan Indikator Sub Kegiatan Jumlah Jasa Administrasi Keuangan yang terbayarkan.

II. Persentasi Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu :

I. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

Kegiatan ini didukung oleh 2 (dua) sub kegiatan, yaitu :

- a. Sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Usaha.

Sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Usaha mempunyai 1 (satu) indikator keluaran, yaitu : Jumlah Pelayanan Perijinan non usaha Yang dilaksanakan, dengan target 313 pemohon terealisasi 473 pemohon atau 151,11 %, diantaranya meliputi : Surat Keterangan Dispensasi, Surat Keterangan Waris, Surat Keterangan Akta, SKCK, Surat Keterangan Pindah, SKTM, Andon, Domisili, BBM, P2T Realisasi capaian kinerja sampai triwulan I ini telah melebihi target dari 25 % terealisasi 111,25 %

- b. Sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan.

Sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan mempunyai 1 (satu) indikator keluaran, yaitu : Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait Non Perijinan, yang meliputi : KTP dan KK dengan target 988 pemohon terealisasi 781 pemohon, sehingga mempunyai capaian kinerja sebesar 79,04%.

Realisasi capaian kinerja sampai triwulan I ini telah melebihi target dari 25 % terealisasi 79,04 %

- c. Sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan yang di Limpahkan.

Sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan yang di Limpahkan, mempunyai (satu) indikator yaitu 1 Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang di limpahkan, dalam hal ini berupa jumlah lembar SPPT PBB yang di distribusikan kepada warga sejumlah

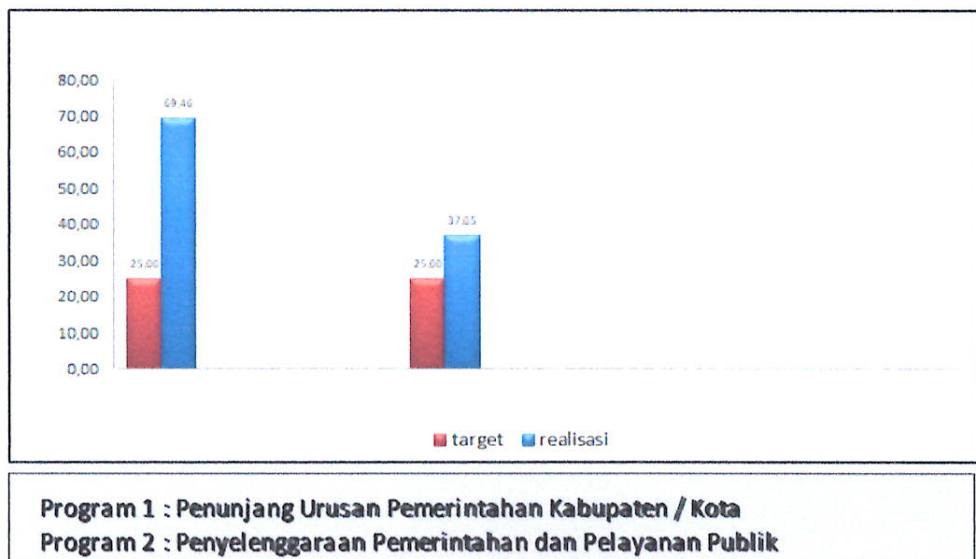
Anggaran Pelaksanaan Kegiatan

Anggaran yang mendukung sasaran strategis pada Triwulan I ini sebesar Rp 3.124.296.843 dengan realisasi Rp. 2.142.306.930 atau 68,56 % didukung dari 2 Program yaitu sebagaimna dalam table di bawah ini :

**PROGRAM DAN ANGGARAN YANG MENDUKUNG PENGUKURAN KINERJA
TRIWULAN PERTAMA (JANUARI S/D MARET)TAHUN 2024
KECAMATAN BANJARNEGARA**

NO	PROGRAM	TARGET ANGGARAN	REALISASI	PROSENTASE (%)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN / KOTA	Rp 3.038.401.833	Rp 2.110.479.780	69,46
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp 85.895.010	Rp 31.827.150	37,05
	JUMLAH TOTAL	Rp 3.124.296.843	Rp 2.142.306.930	68,56

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat di gambarkan dalam grafik untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari masing – masing program pada triwulan ke tiga, sebagaimana berikut :



Terhadap table dan grafik tersebut diatas masih terdapat beberapa kelemahan atau keberhasilan yang menjadi penyebab target tidak tercapai dan yang telah tercapai , diantaranya sebagai berikut :

a. Program Penunjang Pemerintahan Kabupaten / Kota

Pada Program ini telah mencapai target kinerja yaitu lebih dari 25 %.baik serapan keuangan maupun kinerja.

Karena Program ini terdapat kebutuhan pokok kantor dan hak – hak pegawai seperti Gaji dan Tunjangan ASN yang harus di bayarkan tepat waktu.

b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Pada Triwulan Pertama kinerja Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

Kelemahan :

Pada program ini pelaksanaan kegiatan di mulai pada bulan maret di karenakan harus menyelesaikan laporan barang dan keuangan sehingga untuk serapan keuangan belum terealisasi sesuai target, akan tetapi

secara kinerja telah di laksanakan sesuai perencanaan, dan secara serapan keuangan telah memenuhi target kinerja yaitu lebih dari 25 %

Upaya yang dilakukan :

Atas kinerja yang belum tercapainya pada target ini, pada Triwulan kedua yaitu dari serapan keuangan , akan diusahakan di laksanakan dengan memperhatikan anggaran kasda sesuai jadwal pelaksanaan, dan secara kinerja akan terus di upayakan sesuai dengan perencanaan.

Banjarnegara, April 2023

Pt.CAMAT BANJARNEGARA



Pembina

NIP. 19690302 199903 2 002

**DOKUMEN
LAPORAN EVALUASI
PENGUKURAN KINERJA
TRIWULAN II TAHUN 2024
KECAMATAN BANJARNEGARA**



**PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
KECAMATAN BANJARNEGARA**
Jl.Raya Argasoka Km.2 Telp./Fax. (0286) 591015
BANJARNEGARA
e-mail kec_banjarnegara@banjarnegarakab.go.id

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kenikmatan kepada kita sekalian, pelaksanaan penyusunan dan pembuatan Dokumen Laporan Evaluasi Pengukuran Kinerja Tahun 2024 Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara, sebagai pelaksanaan dari Permenpan RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Dokumen Laporan Evaluasi Pengukuran Kinerja Tahun 2024 Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara merupakan evaluasi internal terhadap pengukuran kinerja setiap triwulanan.

Dokumen Laporan Evaluasi Pengukuran Kinerja Tahun 2024 Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara ini disusun untuk mengungkapkan secara obyektif tentang hasil kinerja berdasar target dan realisasi yang dicapai yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023- 2026

Demikian Dokumen Laporan Evaluasi Pengukuran Kinerja Tahun 2023 Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara disusun, dengan harapan dapat untuk menjadi tolok ukur kinerja dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Banjarnegara Juli 2024

Plt.CAMAT BANJARNEGARA



PENI HARININGSIH, S. Kom

Pembina Tk.I

NIP. 19690203 199901 2 002

**LAPORAN EVALUASI PENGUKURAN KINERJA
TRIWULAN II TAHUN 2024
KECAMATAN BANJARNEGARA KABUPATEN BANJARNEGARA**

Pelaksanaan kegiatan pada Kecamatan Banjarnegara telah berlangsung selama 3 (tiga) bulan yaitu bulan April sampai dengan Juni 2024 yang berarti telah memasuki Triwulan II. Berdasarkan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja tahun 2024 maka perlu dilakukan evaluasi guna diperoleh informasi mengenai pencapaian target beserta kendala dan solusi sehingga target tahunan yang telah ditetapkan dapat dicapai.

Capaian Kinerja sesuai dengan Indikator Kinerja Kecamatan Banjarnegara

Adapun capaian kinerja Triwulan II pada Kecamatan Banjarnegara dapat dijelaskan sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET DAN REALISASI 2024		
				TARGET TAHUNAN	TARGET S/D TW II	REALISASI S/D TW II
1	Meningkatnya Kualitas Penyeleenggaraan Pemerintahan Daerah untuk urusan kewilayahan.	Nilai SAKIP Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	72,40	40	40
			1. Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	50	50
			2. Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	50	50
			3. Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	50	50
2	Meningkatnya Efektifitas dan Transparansi Layanan Publik untuk urusan kewilayahan	Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	83,4	-	-
			1. Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	100%	50	50
			2. Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	100%	50	50

Pengukuran dan pencapaian kinerja masing-masing sasaran strategis dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran1 :

Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah untuk urusan Kewilayahannya.

Pemerintah yang akuntabel diwujudkan dengan keseimbangan antara dokumen perencanaan kinerja ,pengukuran kinerja ,pelaporan kinerja ,evaluasi internal dan pencapaian sasaran/kinerja organisasi..Dokumen yang telah disusun sampai dengan Triwulan 2 Tahun 2024 berupa RKA, DPA, Rencana Kerja, Perjanjian Kinerja, Laporan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan seperti : CALK (Akuntansi), BMD (Aset), Simbarsada (Aset) dan dokumen dalam rangka penilaian kinerja pada Kecamatan Banjarnegara. Dokumen dokumen tersebut digunakan dalam rangka mendukung akuntabilitas kinerja yang akan dilakukan evaluasi oleh Inspektorat Kabupaten Banjarnegara.

A. Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan 1 (satu) kegiatan dan 6 (enam) Sub Kegiatan yakni :

1. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - a. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa dengan Indikator Sub Kegiatan Jumlah desa tertib Administrasi Umum dan jumlah desa tertib Administrasi Kependudukan
 - b. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Pendayagunaan Aset Desa dengan Indikator Sub Kegiatan Jumlah tertib Administrasi Keuangan
 - c. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pembangunan Desa dengan Indikator Sub Kegiatan Jumlah desa Tertib Administrasi Keuangan

- e. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan Indikator Sub Kegiatan Jumlah Desa Tertib Administrasi Umum
- f. Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan Indikator Sub Kegiatan Jumlah Desa Tertib Administrasi Lainnya
- g. Koordinasi Pendampingan Aset Desa, dengan indikator Sub Kegiatan Jumlah Desa Administrasi Umum
- h. Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

B. Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

Pada Indikator Program ini terdapat beberapa Kegiatan yang masing – masing kegiatan memiliki Sub Kegiatan dan masing – masing Sub Kegiatan memiliki Indikator Sub Kegiatan antara lain :

- 1. Kegiatan Admnistrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan Indikator Sub Kegiatan Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang terpenuhi
 - b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan Indikator Sub Kegiatan Jumlah Bahan Logistik Kantor yang terpenuhi
- 2. Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik dengan Indikator Sub Kegiatan Jumlah Jas Komunikasi Sumber Daya Air Listrik yang terpenuhi

- b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan Indikator Sub Kegiatan Jumlah Jasa Administrasi Perkantoran yang terbayarkan
- 3. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Dinas, Operasional Lapangan dengan Indikator Sub Kegiatan Jumlah Kendaraan Dinas, Pajak Kendaraan Dinas yang terpelihara dan terbayarkan pajaknya
 - b. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan Indikator Sub Kegiatan Gedung Kantor yang terpelihara
 - c. Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan Indikator Sub Kegiatan Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang terpelihara

C. Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan,

dengan 1 (satu) kegiatan dan 4 (empat) Sub Kegiatan yakni :

1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

- a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
- b. Pembangunan Sarana dan Prasana Kelurahan dengan Indikator Sub Kegiatan Jumlah Sarana dan Prasaran yang di bangun.
- c. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dengan Indikator Sub Kegiatan Jumlah Kelompok Masyarakat yang di bina
- d. Evaluasi Kelurahan dengan Indikator Sub Kegiatan Jumlah Laporan Evaluasi Kelurahan yang dilaksanakan

D. Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum,

dengan 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan yakni :

1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

- a. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan dengan Indikator Sub Kegiatan Jumlah tugas Forkompinca yang terlaksana

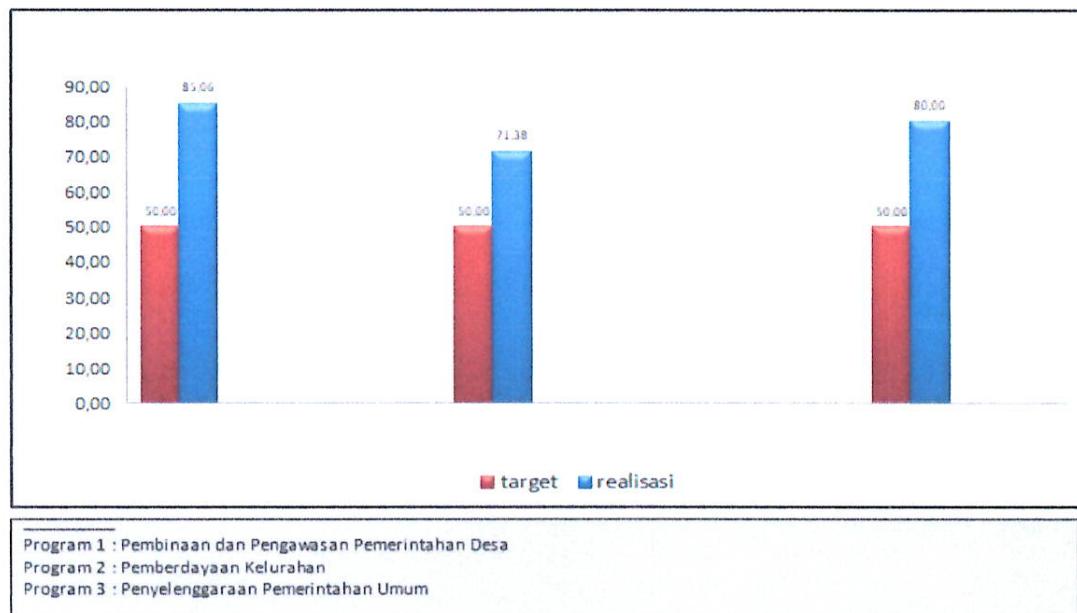
Anggaran Pelaksanaan Kegiatan

Anggaran yang mendukung sasaran strategis pada Triwulan II ini sebesar Rp 2.323.381.722 dengan realisasi Rp. 1.760.119.400 atau 75,75 % didukung dari 3 Program yaitu sebagaimana dalam table di bawah ini :

**PROGRAM DAN ANGGARAN YANG MENDUKUNG PENGUKURAN KINERJA
TRIWULAN KEDUA (APRIL S/D JUNI) TAHUN 2024
KECAMATAN BANJARNEGARA**

NO	PROGRAM	TARGET ANGGARAN	REALISASI	PROSENTASE (%)
1	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	Rp 29.955.300	Rp 25.479.250	85,06
	PEMERINTAHAN DESA			
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN KELURAHAN	Rp 2.293.426.366	Rp 1.637.073.600	71,38
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN	Rp 10.125.000	Rp 8.100.000	80
	PEMERIBATAHAN UMUM			
	JUMLAH TOTAL	Rp 2.323.381.722	Rp 1.760.119.400	75,75

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat di gambarkan dalam grafik untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari masing – masing program pada triwulan ke dua, sebagaimana berikut :



Terhadap table tersebut diatas masih terdapat beberapa kelemahan atau keberhasilan yang menjadi penyebab target tidak tercapai dan yang telah tercapai , diantarnya sebagai berikut :

a. Program Pembinaan dan Pengawasan Masyarakat Desa

Pada program Pembinaan dan Pengawasan Masyarakat Desa , pada Thun Anggana 2024 hanya ada satu Sub Kegiatan yang ada Anggarannya yaitu Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa , untuk Sub Kegiatan yang lain tidak terdapat anggaran , di karenakan Kemampuan Keuangan Daerah.

Kelemahan :

Pada Triwulan I – IV secara serapan anggaran dan besaran anggaran hanya ada satu Sub Kegiatan yang ada anggarannya yaitu Fasilitasi

Pemilihan Kepala Desa , Hal ini menyebabkan program ini tidak bisa terlaksana secara maximal, karena kegiatan bisa berjalan baik juga di dukung dengan anggaran yang mencukupi.

Upaya yang di lakukan :

Pada Triwulan ketiga semua kegiatan terkait pembinaan dan pengawasan Masyarakat Desa di upayakan dilaksanakan dengan memperhatikan yang lebih prioritas, dengan menggunakan anggaran logistic berupa makan minum dalam rangka sosialisasi terhadap masyarakat yang di undang dalam rangka pelaksanaan kegiatan.

b. Program Pemberdayaan Kelurahan

Pada Triwulan kedua Program Pemberdayaan Kelurahan telah mencapai target kinerja lebih dari 50 % ,yaitu 71,38 .

Kelemahan :

Terkait program ini terdapat kelemahan pada harga satuan yang ada di aplikasi SIPD dengan harga yang ada di masyarakat sangat berbeda jauh, misal pasir, besi, semen kebutuhan pokok terkait pembangunan fisik , harga ada yang lebih tinggi dari harga riel di lapangan , sehingga mengalami kesulitan pada saat belanja dan akan berpengaruh pada anggaran secara keseluruhan.

Upaya yang dilakukan :

Pada ketercapaian target ini karena di pengaruhi oleh target kinerja DAU terikat yang terlaksana tepat waktu, sehingga program ini secara kinerja dan serapan telah tercapai dan melebihi target, dan untuk triwulan ketiga di usahakan pada masing – masing kelurahan untuk melakukan verifikasi harga untuk di ajukan ke bagian Aset di BPPKAD dalam rangka Menyusun standar harga yang sesuai dengan harga riel di masyarakat, pekerjaan dilaksanakan tepat waktu sehingga pada tri wulan ke IV di usahan sudah selesai, dan tidak ada silpa.

c. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Pada Triwulan kedua Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum telah mencapai target kinerja lebih dari 50 % ,yaitu 80 % .walaupun secara serapan keuangan telah tercapai melebihi target akan tetapi masih banyak kendala yang harus di kerjakan pada triwulan selanjutnya .

Kelemahan :

Sampai dengan Triwulan ke 2 Program ini secara anggaran telah terserap 80 % atau telah dari 50 % oleh karena itu secara kinerja , pekerjaan telah terlaksana sesuai perencanaan.

Program Kegiatan ini membutuhkan kinerja yang sinergi lintas sectoral, antara lain, dari Kepolisian, Dnramil, dan Kecamatan,

Upaya yang di lakukan :

Pada Triwulan ketiga akan di tingkatkan koordinasinya kepada pihak – pihak yang terlibat dalam rangka persiapan pelaksanaan pilkada pada Triwulan ke IV agar pelaksanaan pilkada aman dan lancar, dan Anggaran telah terserap sesuai dengan jadwal pelaksanaan.

Sasaran 2

**Meningkatnya Efektifitas dan Transparansi Layanan
Publik untuk urusan Kewilayahannya**

Sasaran Strategis Meningkatnya Efektifitas dan Transparansi Layanan Publik untuk urusan kewilayahannya dengan 1(satu) indikator Kinerja sasaran yaitu Nilai SKM Kecamatan Adapun target dan realisasi kinerja pada sasaran ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai SKM Kecamatan

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat atau Indeks Kepuasan Masyarakat adalah Informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif atas pendapat masyarakat pengguna jasa dalam memperoleh pelayanan dari aparatur pemerintah dalam hal ini kecamatan Banjarnegara. Kegiatan ini belum terlaksana atau target masih 0 % karena hasil dari survei sampai edengan bulan Agustus 2024 , sehingga laporan capaian kinerjanya baru bisa di laporkan pada pengukuran kinerja triwulan ke III.

Untuk mengukur capaian kinerja ini dilakukan pengukuran kinerja yang didukung oleh beberapa indikator kinerja program, adapun realisasi dari masing masing indikator kinerja program adalah sebagai berikut:

I. Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

Pada Indikator Program ini terdapat beberapa Kegiatan yang masing – masing kegiatan memiliki Sub Kegiatan dan masing – masing Sub Kegiatan memiliki Indikator Sub Kegiatan antara lain :

A. Kegiatan Admnistrasi Keuangan Perangkat Daerah

1. Penyediaan Gaji dan Tunjang ASN dengan Indikator Sub Kegiatan Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayarkan.
2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD dengan Indikator Sub Kegiatan Jumlah Jasa Administrasi Keuangan yang terbayarkan.dengan sub kegiatan Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD. Dengan Indikator Sub Kegiatan berupa Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/

**B. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah**

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan indikator Sub Kegiatan Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan indikator jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD

C. Kegiatan Admnistrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan Indikator Sub Kegiatan Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan
- b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan Indikator Sub Kegiatan Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan

D. Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan Indikator Sub Kegiatan Jumlah Jas Komunikasi Sumber Daya Air Listrik yang disediakan.
- b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan Indikator Sub Kegiatan Jumlah Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan.

E. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang

Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Dinas, Operasional Lapangan dengan Indikator Sub Kegiatan Jumlah Kendaraan Dinas, Operasional atau Lapangan yang di pelihara dan di bayar pajak perijinananya.
- b. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan Indikator Sub Kegiatan Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan yang di rehabilitasi/ terpelihara
- c. Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan Indikator Sub Kegiatan Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terpelihara.

F. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah.

- a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan Indikator Sub Kegiatan Jumlah unit sarana dan prasarana Gedung kantor dan bangunan lainnya yang di sediakan.
- b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan Indikator Sub Kegiatan Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan
- c. Pengadaan Mebel dengan Indikator Sub Kegiatan Jumlah unit mebel yang disediakan
- d. Pengadaan Aset tetap Lainnya dengan Indikator Sub Kegiatan Jumlah unit Aset tetap lainnya yang disediakan
- e. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan Indikator Sub Kegiatan Jumlah unit sarana dan prasarana Pendukung Gedung kantor dan bangunan lainnya yang di sediakan.

II. Persentasi Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Pada Indikator Program ini terdapat 1 (satu) Kegiatan yang memiliki 3 (tiga) Sub Kegiatan memiliki Indikator Sub Kegiatan antara lain :

I. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

Kegiatan ini didukung oleh 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu :

a. Sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Usaha.

Sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Usaha mempunyai 1 (satu) indikator keluaran, yaitu : Jumlah Pelayanan Perijinan non usaha Yang dilaksanakan, dengan target 625 pemohon terealisasi 1.009 pemohon atau 161,44 %, diantaranya meliputi : Surat Keterangan Dispensasi, Surat Keterangan Waris, Surat Keterangan Akta, SKCK, Surat Keterangan Pindah, SKTM, Andon, Domisili, BBM, P2T Realisasi capaian kinerja sampai triwulan 2 ini telah melebihi target dari 50 % terealisasi 161,44 %

b. Sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan.

Sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan mempunyai 1 (satu) indikator keluaran, yaitu : Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait Non Perijinan, yang meliputi : KTP dan KK dengan target 1.975 pemohon terealisasi 1.859 pemohon, sehingga mempunyai capaian kinerja sebesar 94,12%.

. Realisasi capaian kinerja sampai triwulan I ini telah melebihi target dari 50 % terealisasi 94,12 %

c. Sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan yang di Limpahkan.

Sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan yang di Limpahkan,mempunyai (satu) indicator yaitu 1 Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang di limpahkan, dalam hal ini berupa jumlah lembar SPPT PBB yang di distribusikan kepada warga sejumlah , sampai dengan triwulan ke II jumlah SPPT PBB yang tersalurkan ke wajib pajak sudah 100 % akan tetapi pembayaran pajaknya belum terealisasi semua , di karenakan batas pembayaran pajak sampai bulan September.pembayaran stelah bulan September akan mendapat denda, katerna keterlambatan.

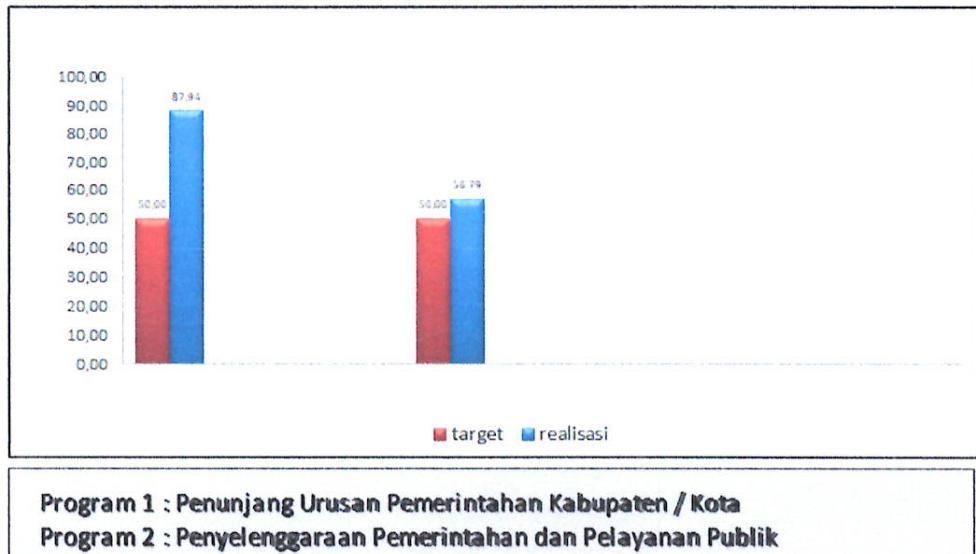
Anggaran Pelaksanaan Kegiatan

Anggaran yang mendukung sasaran strategis pada Triwulan II ini sebesar Rp 6.353.964.486 dengan realisasi Rp. 534.575.835 atau 87,10 % didukung dari 2 Program yaitu sebagaimna dalam table di bawah ini :

**PROGRAN DAN ANGGARAN YANG MENDUKUNG PENGUKURAN KINERJA
TRIWULAN KEDUA (APRIL S/D JUNI)TAHUN 2024
KECAMATAN BANJARNEGARA**

NO	PROGRAM	TARGET ANGGARAN	REALISASI	PROSENTASE (%)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN / KOTA	Rp 6.182.174.466	5.437.009.285	87,94
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp 171.790.020	Rp 97.566.550	56,79
	JUMLAH TOTAL	Rp 6.353.964.486	Rp 5.534.575.835	87,10

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat di gambarkan dalam grafik untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari masing – masing program pada triwulan ke dua, sebagaimana berikut :



Terhadap table tersebut diatas masih terdapat beberapa kelemahan atau keberhasilan yang menjadi penyebab target tidak tercapai dan yang telah tercapai , diantarnya sebagai berikut :

a. Program Penunjang Pemerintahan Kabupaten / Kota

Pada Program ini telah mencapai target kinerja yaitu lebih dari 50 %.baik serapan keuangan maupun kinerja.

Karena Program ini terdapat kebutuhan pokok kantor dan hak – hak pegawai seperti Gaji dan Tunjangan ASN yang harus di bayarkan tepat waktu.

Pada program ini tidak terdapat kendala yang memberatkan karena program ini berisi kebutuhan pokok kantor dan harus terpenuhi tepat waktu.

b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Pada Triwulan kedua kinerja Program Penyelenggaraan Pemerintahn dan Pelayann Publik, secara serapan keuangan telah mencapai lebih dari 50 % begitu juga target pelayanan perijinan dan perijinana Non Usaha juga telah tercapai sesuai perencanaan bahkan melebihi target, akan tetapi untuk pembayaran SPPT PBB belum tercapai sesuai perencanaan masih banyak yang belum membayar SPPT PBB.

Kelemahan :

Pada program ini pelaksanaan kegiatan, pada Sub Kegiatan Kewenangan yang di limpahkan , terkait pembayaran SPPT PBB masih belum memenuhi target tepat waktu, di karenakan

1. banyak tanah yang sudah di jual belikan akan tetapi tidak lapor kepada Kelurahan atau Desa., sehingga sulit di temukan pemilik wajib pajak yang sebenarnya.

Atas kendala tersebut maka di harapkan BPPKAD selaku Dinas yang menangani pendapatan daerah dari Pajak semua pihak untuk memberikan sosialiasi terkait :

1. Kesadaran masyarakat terkait wajib pajak, dan kemudahan proses mutasi SPPT PBB, serta kemudahan lain yang bisa membayar pajak Bumi dan Bangunan secara online.,
2. BPPKAD memberikan teguran secara tertulis kepada wajib pajak yang tidak membayar pajak .

Banjarnegara, Juli 2024

Plt.CAMAT BANJARNEGARA



PENI HARINGSIH, S. Kom

Pembina

NIP. 19690302 199903 2 002

2. Terdapat wajib pajak yang jauh dari lokasi minta di bayarkan dulu kepada petugas SPPT PBB tapi tidak di ganti, akhirnya tidak di bayarkan tahun - tahun berikutnya.

Upaya yang dilakukan :

**DOKUMEN
LAPORAN EVALUASI
PENGUKURAN KINERJA
TRIWULAN III TAHUN 2024
KECAMATAN BANJARNEGARA**



**PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
KECAMATAN BANJARNEGARA**
Jl.Raya Argasoka Km.2 Telp./Fax. (0286) 591015
BANJARNEGARA
e-mail kec_banjarnegara@banjarnegarakab.go.id

KATA PENGANTAR

Dengan memanjangkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kenikmatan kepada kita sekalian, pelaksanaan penyusunan dan pembuatan Dokumen Laporan Evaluasi Pengukuran Kinerja Tahun 2024 Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara, sebagai pelaksanaan dari Permenpan RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Dokumen Laporan Evaluasi Pengukuran Kinerja Tahun 2024 Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara merupakan evaluasi internal terhadap pengukuran kinerja setiap triwulanan.

Dokumen Laporan Evaluasi Pengukuran Kinerja Tahun 2024 Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara ini disusun untuk mengungkapkan secara obyektif tentang hasil kinerja berdasar target dan realisasi yang dicapai yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023- 2026

Demikian Dokumen Laporan Evaluasi Pengukuran Kinerja Tahun 2024 Kecamatan Banjarenagara Kabupaten Banjarnegara disusun, dengan harapan dapat untuk menjadi tolok ukur kinerja dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Banjarnegara Oktober 2024
Plt.CAMAT BANJARNEGARA

PENI HARININGSIH, S. Kom
Pembina Tk.I
NIP. 19690203 199901 2 002

**LAPORAN EVALUASI PENGUKURAN KINERJA
TRIWULAN III TAHUN 2024
KECAMATAN BANJARNEGARA KABUPATEN BANJARNEGARA**

Pelaksanaan kegiatan pada Kecamatan Banjarnegara telah berlangsung selama 3 (tiga) bulan yaitu bulan Juli sampai dengan September 2024 yang berarti telah memasuki Triwulan III. Berdasarkan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja tahun 2024 maka perlu dilakukan evaluasi guna diperoleh informasi mengenai pencapaian target beserta kendala dan solusi sehingga target tahunan yang telah ditetapkan dapat dicapai.

Capaian Kinerja sesuai dengan Indikator Kinerja Kecamatan Banjarnegara

Adapun capaian kinerja Triwulan III pada Kecamatan Banjarnegara dapat dijelaskan sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET DAN REALISASI 2024		
				TARGET TAHUNAN	TARGET S/D TW III	REALISASI S/D TW III
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk urusan kewilayahan.	Nilai SAKIP Kecamatan	SAKIP Kecamatan	72,40	72,40	72,40
			1. Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	75	75
			2. Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	75	75
			3. Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	75	75
2	Meningkatnya Efektifitas dan Transparansi Layanan Publik untuk urusan kewilayahan	Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	83,4	-	-
			1. Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	100%	75	75
			2. Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	100%	75	75

Pengukuran dan pencapaian kinerja masing-masing sasaran strategis dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran1 :

Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah untuk urusan Kewilayahannya.

Pemerintah yang akuntabel diwujudkan dengan keseimbangan antara dokumen perencanaan kinerja ,pengukuran kinerja ,pelaporan kinerja ,evaluasi internal dan pencapaian sasaran/kinerja organisasi..Dokumen yang telah disusun sampai dengan Triwulan 3 Tahun 2024 berupa RKA, DPA, Rencana Kerja, Perjanjian Kinerja,DPAP, RKAP, PKP,RKT Laporan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan seperti : CALK (Akuntansi), BMD (Aset), Simbarsada (Aset) dan dokumen dalam rangka penilaian kinerja pada Kecamatan Banjarnegara. Dokumen dokumen tersebut digunakan dalam rangka mendukung akuntabilitas kinerja yang akan dilakukan evaluasi oleh Inspektorat Kabupaten Banjarnegara.

A. Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa,

dengan 1 (satu) kegiatan dan 6 (enam) Sub Kegiatan yakni :

1. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - a. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa dengan Indikator Sub Kegiatan Jumlah desa tertib Administrasi Umum dan jumlah desa tertib Administrasi Kependudukan
 - b. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Pendayagunaan Aset Desa dengan Indikator Sub Kegiatan Jumlah tertib Administrasi Keuangan
 - c. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pembangunan Desa dengan Indikator Sub Kegiatan Jumlah desa Tertib Administrasi Keuangan

- e. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan Indikator Sub Kegiatan Jumlah Desa Tertib Administrasi Umum
- f. Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan Indikator Sub Kegiatan Jumlah Desa Tertib Administrasi Lainnya
- g. Koordinasi Pendampingan Aset Desa, dengan indikator Sub Kegiatan Jumlah Desa Administrasi Umum
- h. Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

B. Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

Pada Indikator Program ini terdapat beberapa Kegiatan yang masing – masing kegiatan memiliki Sub Kegiatan dan masing – masing Sub Kegiatan memiliki Indikator Sub Kegiatan antara lain :

- 1. Kegiatan Admnistrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan Indikator Sub Kegiatan Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang terpenuhi
 - b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan Indikator Sub Kegiatan Jumlah Bahan Logistik Kantor yang terpenuhi
- 2. Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik dengan Indikator Sub Kegiatan Jumlah Jas Komunikasi Sumber Daya Air Listrik yang terpenuhi
 - b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan Indikator Sub Kegiatan Jumlah Jasa Administrasi Perkantoran yang terbayarkan

3. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Dinas, Operasional Lapangan dengan Indikator Sub Kegiatan Jumlah Kendaraan Dinas, Pajak Kendaraan Dinas yang terpelihara dan terbayarkan pajaknya
 - b. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan Indikator Sub Kegiatan Gedung Kantor yang terpelihara
 - c. Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan Indikator Sub Kegiatan Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang terpelihara

C. Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan,

dengan 1 (satu) kegiatan dan 4 (empat) Sub Kegiatan yakni :

1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

- a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
- b. Pembangunan Sarana dan Prasana Kelurahan dengan Indikator Sub Kegiatan Jumlah Sarana dan Prasaran yang di bangun.
- c. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dengan Indikator Sub Kegiatan Jumlah Kelompok Masyarakat yang di bina
- d. Evaluasi Kelurahan dengan Indikator Sub Kegiatan Jumlah Laporan Evaluasi Kelurahan yang dilaksanakan

D. Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum,

dengan 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan yakni :

1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

- a. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan dengan Indikator Sub Kegiatan Jumlah tugas Forkompinca yang terlaksana

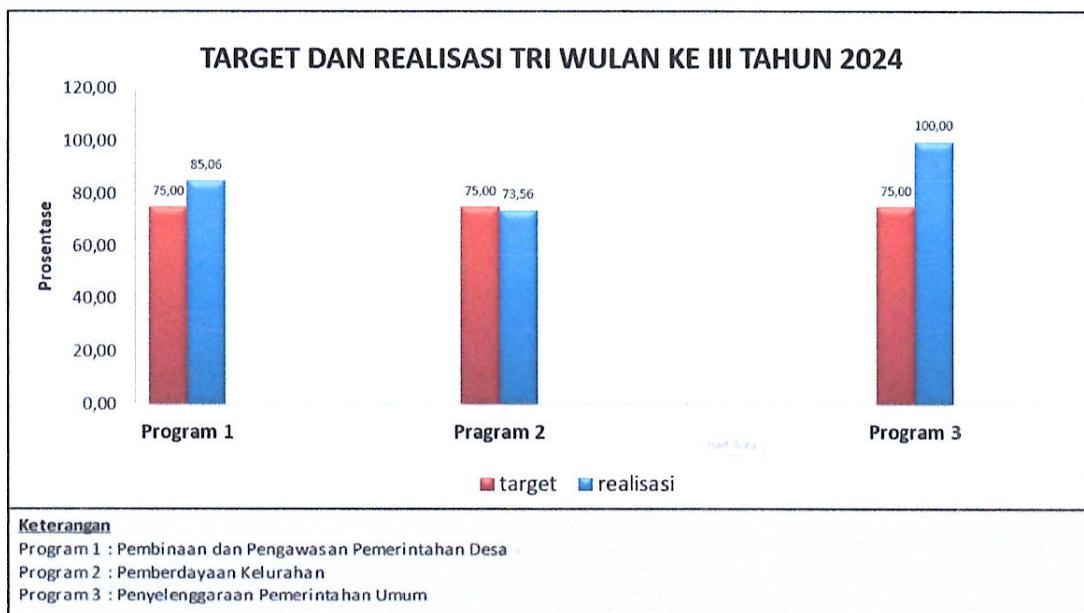
Anggaran Pelaksanaan Kegiatan

Anggaran yang mendukung sasaran strategis pada Triwulan II ini sebesar Rp 2.323.381.722 dengan realisasi Rp. 1.760.119.400 atau 75,75 % didukung dari 3 Program yaitu sebagaimana dalam table di bawah ini :

PROGRAM DAN ANGGARAN YANG MENDUKUNG PENGUKURAN KINERJA
TRIWULAN KETIGA (JULI S/D SEPTEMBER) TAHUN 2024
KECAMATAN BANJARNEGARA

NO	PROGRAM	TARGET ANGGARAN	REALISASI	PROSENTASE (%)
1	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	Rp 29.955.300	Rp 25.479.250	85,06
	PEMERINTAHAN DESA			
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN KELURAHAN	Rp 3.131.342.540	Rp 2.409.956.700	73,56
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN	Rp 10.800.000	Rp 10.800.000	100
	PEMERIBTAHAN UMUM			
	JUMLAH TOTAL	Rp 3.172.097.840	Rp 2446235950	77,11

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat di gambarkan dalam grafik untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari masing – masing program pada triwulan ke tiga, sebagaimana berikut :



Terhadap table dan grafik tersebut diatas masih terdapat beberapa kelemahan atau keberhasilan yang menjadi penyebab target tidak tercapai dan yang telah tercapai , diantarnya sebagai berikut :

a. Program Pembinaan dan Pengawasan Masyarakat Desa

Pada program Pembinaan dan Pengawasan Masyarakat Desa , pada Tahun Anggana 2024 hanya ada satu Sub Kegiatan yang ada Anggaranya yaitu Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa , untuk Sub Kegiatan yang lain tidak terdapat anggaran , di karenakan Kemampuan Keuangan Daerah.

Kelemahan :

Pada Triwulan I – IV secara serapan anggaran dan besaran anggaran hanya ada satu Sub Kegiatan yang ada anggaranya yaitu Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa , Hal ini menyebabkan program ini tidak bisa terlaksana secara maximal, karena kegiatan bisa berjalan baik juga di dukung dengan anggaran yang mencukupi.

Upaya yang di lakukan :

Pada Triwulan ke empat semua kegiatan terkait pembinaan dan pengawasan Masyarakat Desa di upayakan dilaksanakan dengan

memperhatikan yang lebih prioritas, dengan menggunakan anggaran logistic berupa makan minum dalam rangka sosialisasi terhadap masyarakat yang diundang pada pelaksanaan kegiatan.

b. Program Pemberdayaan Kelurahan

Pada Triwulan kedua Program Pemberdayaan Kelurahan telah mencapai target kinerja lebih dari 75 %, yaitu 73,56 %.

Kelemahan :

Terkait program ini terdapat kelemahan pada harga satuan yang ada di aplikasi SIPD dengan harga yang ada di masyarakat sangat berbeda jauh, misal pasir, besi, semen kebutuhan pokok terkait pembangunan fisik, harga ada yang lebih tinggi dari harga riel di lapangan, sehingga mengalami kesulitan pada saat belanja dan akan berpengaruh pada anggaran secara keseluruhan, yaitu ada kegiatan yang tidak dilaksanakan karena harga di lapangan terlalu tinggi, dan terdapat deviasi terhadap anggaran yang tinggi karena hasil lelang harga yang di setujui oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Upaya yang dilakukan :

Pada Triwulan kempat ini target program pemberdayaan kelurahan yang tidak terpenuhi, diusahakan untuk di selesaikan dengan melakukan pendekatan pada petugas PBJ agar harga barang yang melebihi DPA untuk dicarikan jalan keluar, sehingga di harapkan pada triwulan ke IV di usahakan kegiatan pemberdayaan keluar tercapai sesuai perencanaan sudah selesai.,

c. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Pada Triwulan ketiga Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum telah mencapai target kinerja lebih dari 75 %, yaitu 100 %. walaupun secara serapan keuangan telah tercapai

melebihi target akan tetapi masih banyak kendala yang harus di kerjakan pada triwulan selanjutnya .

Kelemahan :

Sampai dengan Triwulan ke 3 Program ini secara anggaran telah terserap 100 % atau telah dari 75 % oleh karena itu secara kinerja , pekerjaan telah terlaksana sesuai perencanaan.

Program Kegiatan ini membutuhkan kinerja yang sinergi lintas sectoral, antara lain, dari Kepolisian, Dnramil, dan Kecamatan,

Upaya yang di lakukan :

Pada Triwulan keempat akan di tingkatkan koordinasinya kepada pihak – pihak yang terlibat dalam rangka persiapan pelaksanaan pilkada pada Triwulan ke IV agar pelaksanaan pilkada aman dan lancar, dan Anggaran telah terserap sesuai dengan jadwal pelaksanaan.

Sasaran 2	Meningkatnya Efektifitas dan Transparansi Layanan Publik untuk urusan Kewilayahahan
------------------	--

Sasaran Strategis Meningkatnya Efektifitas dan Transparansi Layanan Publik untuk urusan kewilayahahan dengan 1(satu) indikator Kinerja sasaran yaitu Nilai SKM Kecamatan Adapun target dan realisasi kinerja pada sasaran ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat atau Indeks Kepuasan Masyarakat adalah Informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif atas pendapat masyarakat pengguna jasa dalam memperoleh pelayanan dari aparatur pemerintah dalam hal ini kecamatan Banjarnegara. Pada Triwulan Ke III Kegiatan ini sudah merekap hasil survei dan telah melebihi target

yaitu 83,4 % dan telah tercapai 84,05 % dari hasil survei Bulan Januari sampai dengan Bulan Agustus 2024 , grafik nilai SKM dari Tahun 2019 - 2024



Berdasarkan grafik tersebut di atas dapat di gambarkan nilai unsur untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari masing – masing unsur Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan pada Tahun 2024, sebagaimana berikut :



Hasil survei Kepuasan Masyarakat pada Tahun 2024 secara keseluruhan telah mengalami penurunan apabila di bandingkan pada tahun 2023 , hal ini di sebabkan ada salah satu koresponen yang mengisi survei dengan menjawab bahwa pelayanan adminduk tidak gratis , di sebabkan koresponden tidak bertanya terlebih dulu, sehingga komponen tersebut memiliki hasil yang rendah dan mempengaruhi hasil survei secara keseluruhan,

Untuk mengukur capaian kinerja ini dilakukan pengukuran kinerja yang didukung oleh beberapa indikator kinerja program, adapun realisasi dari masing masing indikator kinerja program adalah sebagai berikut:

I. Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

Pada Indikator Program ini terdapat beberapa Kegiatan yang masing – masing kegiatan memiliki Sub Kegiatan dan masing – masing Sub Kegiatan memiliki Indikator Sub Kegiatan antara lain :

A. Kegiatan Admnistrasi Keuangan Perangkat Daerah

1. Penyediaan Gaji dan Tunjang ASN dengan Indikator Sub Kegiatan Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayarkan.
2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD dengan Indikator Sub Kegiatan Jumlah Jasa Administrasi Keuangan yang terbayarkan.dengan sub kegiatan Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD. Dengan Indikator Sub Kegiatan berupa Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/

**B. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah**

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan indikator Sub Kegiatan Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan indikator jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD

C. Kegiatan Admnistrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan Indikator Sub Kegiatan Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan
- b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan Indikator Sub Kegiatan Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan

D. Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan Indikator Sub Kegiatan Jumlah Jas Komunikasi Sumber Daya Air Listrik yang disediakan.
- b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan Indikator Sub Kegiatan Jumlah Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan.

E. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang

Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Dinas, Operasional Lapangan dengan Indikator Sub Kegiatan Jumlah Kendaraan Dinas, Operasional atau Lapangan yang di pelihara dan di bayar pajak perijinananya.
- b. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan Indikator Sub Kegiatan Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan yang di rehabilitasi/ terpelihara
- c. Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan Indikator Sub Kegiatan Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terpelihara.

F. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah.

- a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan Indikator Sub Kegiatan Jumlah unit sarana dan prasarana Gedung kantor dan bangunan lainnya yang di sediakan.
- b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan Indikator Sub Kegiatan Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan
- c. Pengadaan Mebel dengan Indikator Sub Kegiatan Jumlah unit mebel yang disediakan
- d. Pengadaan Aset tetap Lainnya dengan Indikator Sub Kegiatan Jumlah unit Aset tetap lainnya yang disediakan
- e. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan Indikator Sub Kegiatan Jumlah unit sarana dan prasarana Pendukung Gedung kantor dan bangunan lainnya yang di sediakan.

II. Persentasi Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Pada Indikator Program ini terdapat 1 (satu) Kegiatan yang memiliki 3 (tiga) Sub Kegiatan memiliki Indikator Sub Kegiatan antara lain :

I. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

Kegiatan ini didukung oleh 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu :

a. Sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Usaha.

Sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Usaha mempunyai 1 (satu) indikator keluaran, yaitu : Jumlah Pelayanan Perijinan non usaha Yang dilaksanakan, dengan target 1.875 pemohon terealisasi 1.689 pemohon atau 90,08 %, diantaranya meliputi : Surat Keterangan Dispensasi, Surat Keterangan Waris, Surat Keterangan Akta, SKCK, Surat Keterangan Pindah, SKTM, Andon, Domisili, BBM, P2T Realisasi capaian kinerja sampai triwulan ini telah melebihi target dari 75 % terealisasi 90,08 %

b. Sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan.

Sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan mempunyai 1 (satu) indikator keluaran, yaitu : Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait Non Perijinan, yang meliputi : KTP dan KK dengan target 2.963 pemohon terealisasi 2.764 pemohon, sehingga mempunyai capaian kinerja sebesar 93,28%.

Realisasi capaian kinerja sampai triwulan I ini telah melebihi target dari 75 % terealisasi 93,28 %

c. Sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan yang di Limpahkan.

Sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan yang di Limpahkan, mempunyai (satu) indicator yaitu 1 Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang di limpahkan, dalam hal ini berupa lembar SPPT PBB yang di distribusikan kepada warga sejumlah 32. 623 lembar SPPT PBB, sampai dengan triwulan ke III jumlah SPPT PBB yang tersalurkan ke wajib pajak sudah 100 % akan tetapi pembayaran pajaknya belum terealisasi semua , di karenakan batas pembayaran pajak sampai bulan Oktober .pembayaran setelah bulan Oktober akan mendapat denda, katanya keterlambatan.

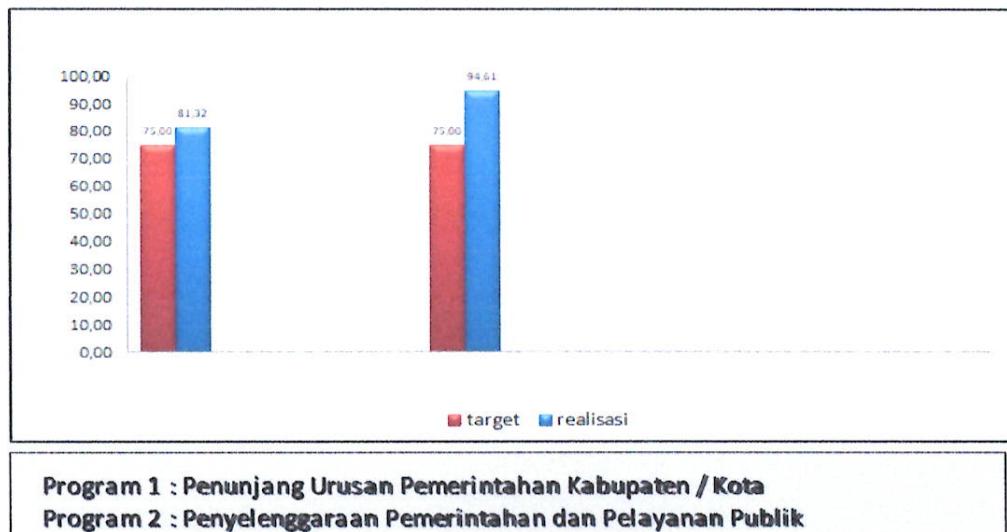
Anggaran Pelaksanaan Kegiatan

Anggaran yang mendukung sasaran strategis pada Triwulan III ini sebesar Rp 9.467.982.341 dengan realisasi Rp. 7.734.489.690 atau 81,69 % didukung dari 2 Program yaitu sebagaimna dalam table di bawah ini :

PROGRAM DAN ANGGARAN YANG MENDUKUNG PENGUKURAN KINERJA
TRIWULAN KETIGA (JULI S/D SEPTEMBER)TAHUN 2024
KECAMATAN BANJARNEGARA

NO	PROGRAM	TARGET ANGGARAN	REALISASI	PROSENTASE (%)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Rp 9.210.297.311	7.490.668.580	81,32
	KABUPATEN / KOTA			
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	Rp 257.685.030	Rp 243.821.150	94,61
	DAN PELAYANAN PUBLIK			
	JUMLAH TOTAL	Rp 9.467.982.341	Rp 7.734.489.690	81,69

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat di gambarkan dalam grafik untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari masing – masing program pada triwulan ke tiga, sebagaimana berikut



Terhadap table dan grafik tersebut diatas masih terdapat beberapa kelemahan atau keberhasilan yang menjadi penyebab target tidak tercapai dan yang telah tercapai , diantarnya sebagai berikut :

a. Program Penunjang Pemerintahan Kabupaten / Kota

Pada Program ini telah mencapai target kinerja yaitu lebih dari 75 %.baik serapan keuangan maupun kinerja.

Karena Program ini terdapat kebutuhan pokok kantor dan hak – hak pegawai seperti Gaji dan Tunjangan ASN yang harus di bayarkan tepat waktu.

Pada program ini tidak terdapat kendala yang memberatkan karena program ini berisi kebutuhan pokok kantor dan harus terpenuhi tepat waktu.

b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Pada Triwulan kedua kinerja Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, secara serapan keuangan telah mencapai lebih dari 75 % begitu juga target pelayanan perijinan dan perijinan Non Usaha, juga kegiatan Kewenangan Lain yang di limpahkan kepada camat, juga telah tercapai sesuai perencanaan bahkan melebihi target, khusus Sub Kegiatan kewenangan lain yang di limpahkan kepada camat, targetnya adalah lembar SPPT BPP yang tersalurkan kepada wajib pajak yang pada triwulan pertama telah tercapai targetnya, akan tetapi untuk pembayaran SPPT PBB belum tercapai masih terdapat beberapa wajib pajak yang belum membayar SPPT PBB.

Kelemahan :

Pada program ini pelaksanaan kegiatan, pada Sub Kegiatan Kewenangan lain yang di limpahkan , yaitu terkait sosialisasi pembayaran SPPT PBB dan sudah didistribusikan pada triwulan pertama dan pembayaran masih belum memenuhi target tepat waktu, di karenakan

1. banyak tanah yang sudah di jual belikan akan tetapi tidak lapor kepada Kelurahan atau Desa., dan pemilik tanah sudah ganti orang lain, sehingga sulit di temukan pemilik wajib pajak yang sebenarnya.
2. Terdapat wajib pajak yang jauh dari lokasi minta di bayarkan dulu kepada petugas SPPT PBB tapi tidak di ganti, akhirnya tidak di bayarkan tahun - tahun berikutnya.
3. Wajib Pajak yang bandel, belum menyadari kewajibannya untuk membayar pajak

Upaya yang dilakukan :

Atas kendala tersebut maka di harapkan BPPKAD selaku Dinas yang menangani pendapatan daerah dari Pajak semua pihak untuk memberikan sosialiasi terkait :

1. Kesadaran masyarakat terkait wajib pajak, dan kemudahan proses mutasi SPPT PBB, serta kemudahan lain yang bisa membayar pajak Bumi dan Bangunan secara online, sehingga mempermudah bagi wajib pajak yang berada di luar daerah.
2. BPPKAD memberikan teguran secara tertulis kepada wajib pajak yang tidak membayar pajak untuk melakukan pendekatan – pendekatan yang baik guna mencari jalan keluar , agar wajib pajak menyadari akan kewajibanya sebagai wajib pajak.
3. Petugas distribusi SPPT PBB untuk terus memberikan pemahaman terkait kesadaran membayar pajak, dengan membuat target , untuk mengukur tingkat keberhasilan.

Banjarnegara, Oktober 2024

PH.CAMAT BANJARNEGARA



PENI HARINGSIH, S. Kom

Pembina

NIP. 19690302 199903 2 002

**DOKUMEN
LAPORAN EVALUASI
PENGUKURAN KINERJA
TRIWULAN IV TAHUN 2024
KECAMATAN BANJARNEGARA**



**PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
KECAMATAN BANJARNEGARA**

**Jl.Raya Argasoka Km.2 Telp./Fax. (0286) 591015
BANJARNEGARA
e-mail kec_banjarnegara@banjarnegarakab.go.id**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjangkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kenikmatan kepada kita sekalian, pelaksanaan penyusunan dan pembuatan Dokumen Laporan Evaluasi Pengukuran Kinerja Tahun 2024 Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara, sebagai pelaksanaan dari Permenpan RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Dokumen Laporan Evaluasi Pengukuran Kinerja Tahun 2024 Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara merupakan evaluasi internal terhadap pengukuran kinerja setiap triwulanan.

Dokumen Laporan Evaluasi Pengukuran Kinerja Tahun 2024 Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara ini disusun untuk mengungkapkan secara obyektif tentang hasil kinerja berdasar target dan realisasi yang dicapai yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023- 2026

Demikian Dokumen Laporan Evaluasi Pengukuran Kinerja Tahun 2024 Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara disusun, dengan harapan dapat untuk menjadi tolok ukur kinerja dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Banjarnegara, 2 Januari 2025



NIP. 19690203 199901 2 002

**LAPORAN EVALUASI PENGUKURAN KINERJA
TRIWULAN IV TAHUN 2024
KECAMATAN BANJARNEGARA KABUPATEN BANJARNEGARA**

Pelaksanaan kegiatan pada Kecamatan Banjarnegara telah berlangsung selama 3 (tiga) bulan yaitu bulan Oktober sampai dengan Desember 2024 yang berarti telah memasuki Triwulan IV. Berdasarkan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja tahun 2024 maka perlu dilakukan evaluasi guna diperoleh informasi mengenai pencapaian target beserta kendala dan solusi sehingga target tahunan yang telah ditetapkan dapat dicapai.

Capaian Kinerja sesuai dengan Indikator Kinerja Kecamatan Banjarnegara

Adapun capaian kinerja Triwulan IV pada Kecamatan Banjarnegara dapat dijelaskan sebagai berikut:

D	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET DAN REALISASI 2024		
				TARGET TAHUNAN	TARGET S/D TW IV	REALISASI S/D TW IV
	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk urusan kewilayahan.	Nilai SAKIP Kecamatan	SAKIP Kecamatan	72,40	72,40	72,40
		1. Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100	100	100
		2. Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	100	100	100
		3. Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100	100	100
		Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	83,4	84,05	84,05
		1. Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	100%	100	100	100
		2. Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	100%	100	100	100

Pengukuran dan pencapaian kinerja masing-masing sasaran strategis dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran1 :

Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk urusan Kewilayahannya.

Pemerintah yang akuntabel diwujudkan dengan keseimbangan antara dokumen perencanaan kinerja ,pengukuran kinerja ,pelaporan kinerja, evaluasi internal dan pencapaian sasaran/kinerja organisasi. Dokumen yang telah disusun sampai dengan Triwulan 4 Tahun 2024 berupa RKA, DPA, Rencana Kerja, Perjanjian Kinerja,DPAP, RKAP, PKP,RKT Laporan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan seperti : CALK (Akuntansi), BMD (Aset), Simbarsada (Aset) dan dokumen dalam rangka penilaian kinerja pada Kecamatan Banjarnegara. Dokumen dokumen tersebut digunakan dalam rangka mendukung akuntabilitas kinerja yang akan dilakukan evaluasi oleh Inspektorat Kabupaten Banjarnegara.

A. Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa,

dengan 1 (satu) kegiatan dan 7 (Tujuh) Sub Kegiatan yakni :

1. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - a. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa dengan Indikator Sub Kegiatan Jumlah Dokumen yang di fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa.
 - b. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa dengan Indikator Sub Kegiatan Jumlah Dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa.

- c. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa dengan Indikator Sub Kegiatan Jumlah Dokumen yang di fasilitasi dalam rangka Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa.
- d. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan Indikator Sub Kegiatan Jumlah Dokumen yang di fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum.
- e. Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan Indikator Sub Kegiatan Jumlah Dokumen yang di fasilitasi dalam rangka Penyusunan Program dan pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- f. Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya dengan indikator Sub Kegiatan Jumlah Dokumen Fasilitasi Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya.
- g. Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

B. Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan,
dengan 1 (satu) kegiatan dan 4 (empat) Sub Kegiatan yakni :

- 1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
 - a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan dengan Indikator Sub Kegiatan Jumlah Lembaga masyarakat yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa.
 - b. Pembangunan Sarana dan Prasana Kelurahan dengan Indikator Sub Kegiatan Jumlah Sarana dan Prasaran yang di bangun.
 - c. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dengan Indikator Sub Kegiatan Jumlah Kelompok Masyarakat yang di bina

- d. Evaluasi Kelurahan dengan Indikator Sub Kegiatan Jumlah Laporan Evaluasi Kelurahan yang dilaksanakan

C. Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum,
dengan 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan yakni :

1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

- a. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan dengan Indikator Sub Kegiatan Jumlah tugas Forkompinca yang terlaksana

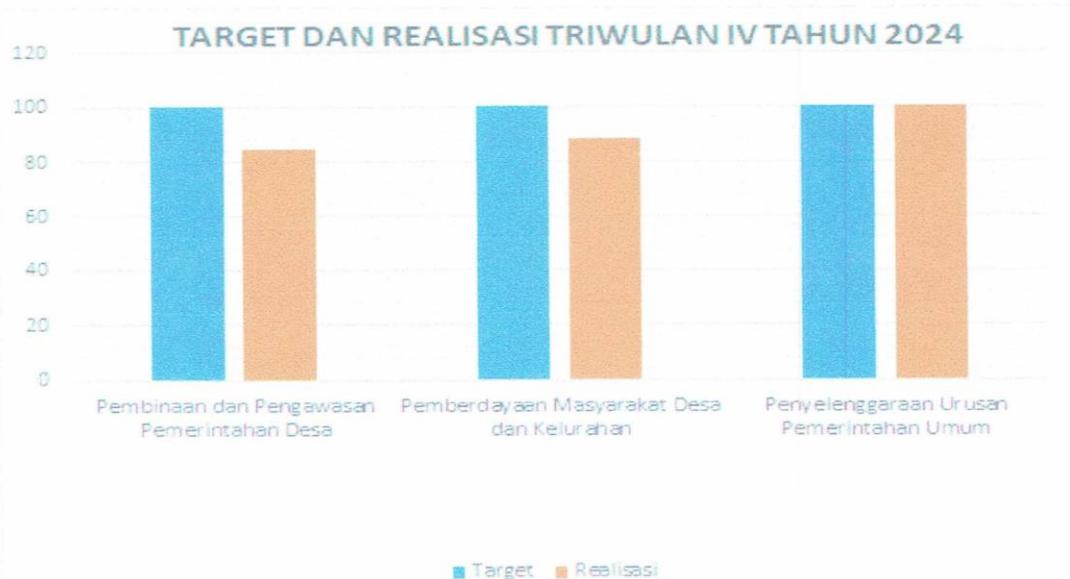
Anggaran Pelaksanaan Kegiatan

Anggaran yang mendukung sasaran strategis pada Triwulan IV ini sebesar Rp 3.317.078.676 dengan realisasi Rp. 2.931.988.046 atau 88,39% didukung dari 3 Program yaitu sebagaimana dalam table di bawah ini :

PROGRAM DAN ANGGRAN YANG MENDUKUNG PENGUKURAN KINERJA
TRIWULAN KEEMPAT (OKTOBER S/D DESEMBER) TAHUN 2024
KECAMATAN BANJARNEGARA

NO	PROGRAM	TARGET ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PROSENTASE (%)
1	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA	29.955.300	25.479.250	85,06
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	3.276.323.376	2.895.708.796	88,38
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	10.800.000	10.800.000	100
	JUMLAH TOTAL	3.317.078.676	2.931.988.046	88,39

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat di gambarkan dalam grafik untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari masing – masing program pada triwulan ke empat, sebagaimana berikut :



Terhadap tabel dan grafik tersebut diatas masih terdapat beberapa kelemahan atau keberhasilan yang menjadi penyebab target tidak tercapai dan yang telah tercapai , diantarnya sebagai berikut :

a. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Pada program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa , pada Tahun Anggara 2024 dengan 1 (satu) Kegiatan dan 7 (Tujuh) Sub Kegiatan, hanya ada satu Sub Kegiatan yang ada Anggaranya yaitu Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa , untuk Sub Kegiatan yang lain tidak terdapat anggaran , di karenakan Kemampuan Keuangan Daerah.

Kelemahan :

Pada Triwulan I – IV secara serapan anggaran dan besaran anggaran hanya ada satu Sub Kegiatan yang ada anggaranya yaitu Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa , Hal ini menyebabkan program ini tidak bisa terlaksana secara maksimal, karena kegiatan bisa berjalan baik juga di dukung dengan anggaran yang mencukupi.

Upaya yang dilakukan :

Pada Triwulan ke empat semua kegiatan terkait Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di upayakan dilaksanakan dengan memperhatikan yang lebih prioritas, dengan menggunakan anggaran logistik berupa makan minum dalam rangka sosialisasi terhadap masyarakat yang diundang pada pelaksanaan kegiatan.

b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan pada Tahun 2024 hanya mempunyai 1 (satu) Kegiatan dan 4 (empat) Sub Kegiatan hanya ada 2 (dua) Sub Kegiatan yang mempunyai Anggaran yaitu Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, untuk Sub Kegiatan yang lain tidak terdapat anggaran, di karenakan Kemampuan Keuangan Daerah.

Pada Triwulan ke empat Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan telah Teralisasi Keuangan sebesar 88,38 %

Kelemahan :

Terkait program ini terdapat kelemahan pada harga satuan yang ada di aplikasi SIPD dengan harga yang ada di masyarakat sangat berbeda jauh, misal pasir, besi, semen kebutuhan pokok terkait pembangunan fisik, harga ada yang lebih tinggi dari harga riel di lapangan, sehingga mengalami kesulitan pada saat belanja dan akan berpengaruh pada anggaran secara keseluruhan, yaitu ada kegiatan yang tidak dilaksanakan karena harga di lapangan terlalu tinggi, dan terdapat deviasi terhadap anggaran yang tinggi karena hasil lelang harga yang di setujui oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Upaya yang dilakukan :

Pada Triwulan kempat ini target kegiatan pemberdayaan kelurahan tidak terpenuhi, diusahakan untuk tahun berikutnya untuk benar benar menghitung sesuai dengan kebutuhan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan.

c. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Pada Triwulan ke empat Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum telah mencapai target kinerja 100 % , walaupun secara serapan keuangan telah mencapai sesuai target akan tetapi masih banyak kendala yang harus di kerjakan pada tahun selanjutnya .

Kelemahan :

Sampai dengan Triwulan keempat Program ini secara anggaran telah terserap 100 % pekerjaan telah terlaksana sesuai perencanaan.

Program Kegiatan ini membutuhkan kinerja yang sinergi lintas sectoral, antara lain, dari Kepolisian, Danramil, dan Kecamatan,

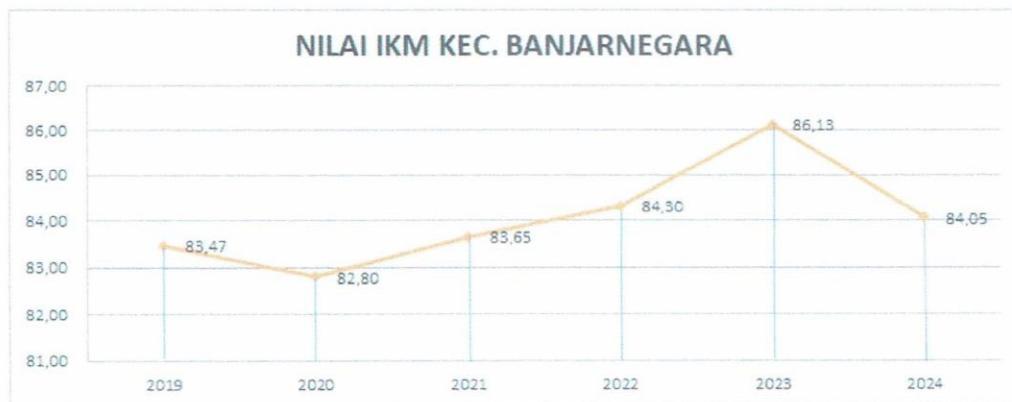
Upaya yang di lakukan :

Pada Triwulan keempat telah di tingkatkan koordinasinya kepada pihak – pihak yang terlibat dalam rangka persiapan pelaksanaan pilkada pada Triwulan ke IV agar pelaksanaan pilkada aman dan lancar, dan Anggaran telah terserap sesuai dengan jadwal pelaksanaan.

Sasaran Strategis Meningkatnya Efektifitas dan Transparansi Pelayanan Publik untuk urusan kewilayahannya dengan 1(satu) indikator Kinerja sasaran yaitu Nilai SKM Kecamatan Adapun target dan realisasi kinerja pada sasaran ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat atau Indeks Kepuasan Masyarakat adalah Informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif atas pendapat masyarakat pengguna jasa dalam memperoleh pelayanan dari aparatur pemerintah dalam hal ini kecamatan Banjarnegara. Pada Triwulan Ke IV Kegiatan ini sudah merekap hasil survei dan telah melebihi target yaitu 83,4 % dan telah tercapai 84,05 % dari hasil survei Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember 2024 ,
grafik nilai SKM dari Tahun 2019 - 2024



Berdasarkan grafik tersebut di atas dapat di gambarkan nilai unsur untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari masing – masing unsur Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan pada Tahun 2024, sebagaimana berikut :



Hasil survei Kepuasan Masyarakat pada Tahun 2024 secara keseluruhan telah mengalami penurunan apabila di bandingkan pada tahun 2023 , hal ini di sebabkan ada salah satu koresponden yang mengisi survei dengan menjawab bahwa pelayanan adminduk tidak gratis, di sebabkan koresponden tidak bertanya terlebih dulu, sehingga komponen tersebut memiliki hasil yang rendah dan mempengaruhi hasil survei secara keseluruhan,

Untuk mengukur capaian kinerja ini dilakukan pengukuran kinerja yang didukung oleh beberapa indikator kinerja program, adapun realisasi dari masing masing indikator kinerja program adalah sebagai berikut:

I. Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Pada Indikator Program ini terdapat beberapa Kegiatan yang masing – masing kegiatan memiliki Sub Kegiatan dan masing – masing Sub Kegiatan memiliki Indikator Sub Kegiatan antara lain :

A. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Dengan 3 (tiga) Sub kegiatan diantaranya yaitu :

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan Indikator Sub Kegiatan Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayarkan.
2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan Indikator sub kegiatan Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD. Dengan Indikator Sub Kegiatan berupa Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.

B. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Dengan 2 (dua) Sub Kegiatan diantaranya Yaitu :

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan indikator Sub Kegiatan Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan indikator Sub Kegiatan Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD

C. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Dengan 2 (dua) Sub kegiatan yaitu :

- a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan Indikator Sub Kegiatan Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan
- b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan Indikator Sub Kegiatan Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan

D. Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dengan 2 (dua) Sub kegiatan yaitu :

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik dengan Indikator Sub Kegiatan Jumlah Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Listrik yang disediakan.
- b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan Indikator Sub Kegiatan Jumlah Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan.

E. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dengan 3 (tiga) Sub Kegiatan yaitu :

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Dinas, Operasional Lapangan dengan Indikator Sub Kegiatan Jumlah Kendaraan Dinas, Operasional atau Lapangan yang di pelihara dan di bayar pajak perijinananya.
- b. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan Indikator Sub Kegiatan Jumlah Gedung Kantor dan Bangunannya yang di rehabilitasi/ terpelihara
- c. Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan Indikator Sub Kegiatan Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terpelihara.

F. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Dengan 5 (lima) Sub Kegiatan yaitu :

- a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan Indikator Sub Kegiatan Jumlah unit sarana dan prasarana Gedung kantor dan bangunan lainnya yang di sediakan.
- b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan Indikator Sub Kegiatan Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan
- c. Pengadaan Mebel dengan Indikator Sub Kegiatan Jumlah unit mebel yang disediakan
- d. Pengadaan Aset tetap Lainnya dengan Indikator Sub Kegiatan Jumlah unit Aset tetap lainnya yang disediakan
- e. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan Indikator Sub Kegiatan Jumlah unit sarana dan prasarana Pendukung Gedung kantor dan bangunan lainnya yang di sediakan.

II. Persentasi Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Pada Indikator Program ini terdapat 2 (dua) Kegiatan yang memiliki beberapa Sub Kegiatan memiliki Indikator Sub Kegiatan antara lain :

1. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

Kegiatan ini didukung oleh 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu :

- a. Sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Usaha.

Sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Usaha mempunyai 1 (satu) indikator keluaran, yaitu : Jumlah Pelayanan Perijinan non usaha Yang dilaksanakan, dengan target 1.875 pemohon terealisasi 1.894 pemohon atau 101 %, diantaranya meliputi : Surat Keterangan Dispensasi, Surat Keterangan Waris, Surat Keterangan Akta, SKCK, Surat Keterangan Pindah, SKTM, Andon, Domisili, BBM, P2T Realisasi capaian kinerja sampai triwulan ini telah melebihi target dari 100% menjadi 101%

- b. Sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan.

Sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan mempunyai 1 (satu) indikator keluaran, yaitu : Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait Non Perijinan, yang meliputi : KTP dan KK dengan target 3.970 pemohon terealisasi 3.580 pemohon, sehingga mempunyai capaian kinerja sebesar 90,17%.

- c. Sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan yang di Limpahkan.

Sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan yang di Limpahkan, mempunyai (satu) indikator yaitu 1 Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang di limpahkan, dalam hal ini berupa

lembar SPPT PBB yang di distribusikan kepada warga sejumlah 32.623 lembar SPPT PBB, sampai dengan triwulan ke IV jumlah SPPT PBB yang tersalurkan ke wajib pajak sudah 100 % .

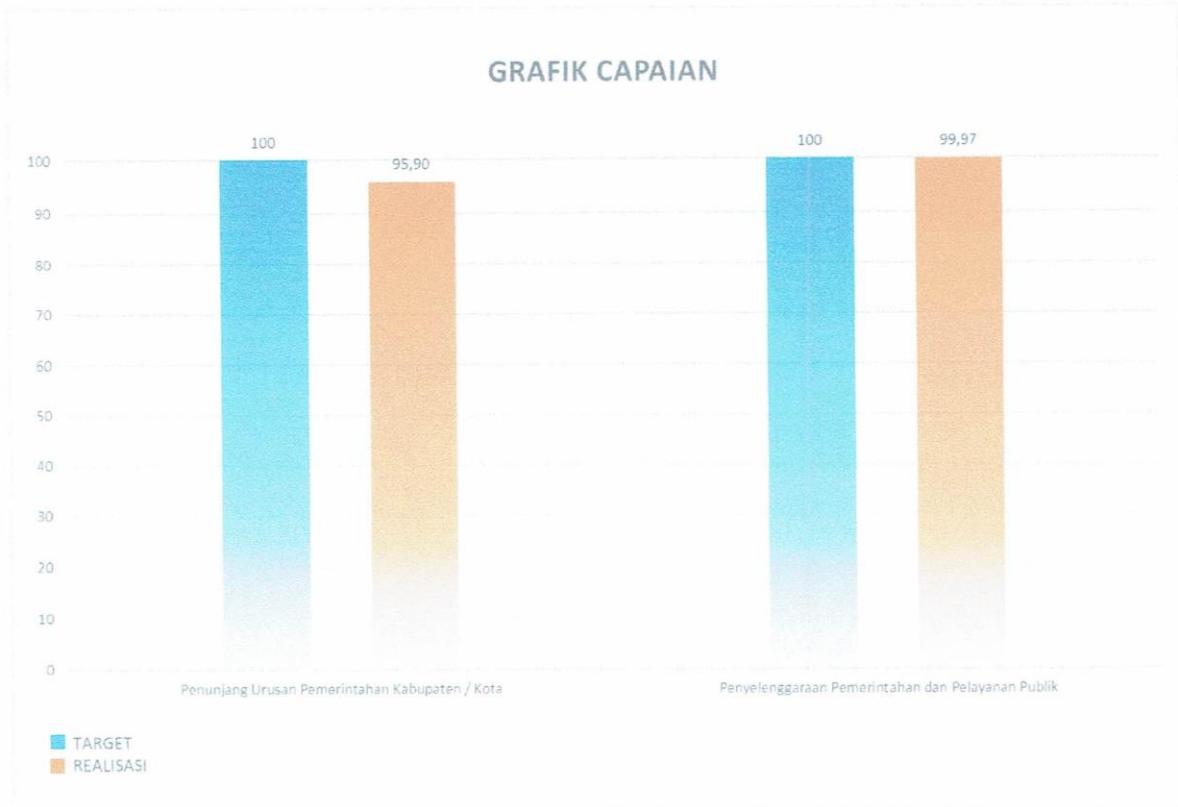
Anggaran Pelaksanaan Kegiatan

Anggaran yang mendukung sasaran strategis pada Triwulan IV ini sebesar Rp 10.242.822.684 dengan realisasi Rp. 9.835.334.802 atau 96,02 % didukung dari 2 Program yaitu sebagaimana dalam table di bawah ini :

PROGRAM DAN ANGGARAN YANG MENDUKUNG PENGUKURAN KINERJA
TRIWULAN KEEMPAT (OKTOBER S/D DESEMBER) TAHUN 2024
KECAMATAN BANJARNEGARA

NO	PROGRAM	TARGET ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PROSENTASE (%)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.955.905.984	9.548.489.652	95,90
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	286.916.700	286.845.150	99,97
	JUMLAH TOTAL	10.242.822.684	9.835.334.802	96,02

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat di gambarkan dalam grafik untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari masing – masing program pada triwulan keempat, sebagaimana berikut



Terhadap table dan grafik tersebut diatas masih terdapat beberapa kelemahan atau keberhasilan yang menjadi penyebab target tidak tercapai dan yang telah tercapai , diantarnya sebagai berikut :

a. **Program Penunjang Pemerintahan Kabupaten / Kota**

Pada Program ini telah mencapai target kinerja yaitu lebih dari 95,90% baik serapan keuangan maupun kinerja.

Karena Program ini terdapat kebutuhan pokok kantor dan hak – hak pegawai seperti Gaji dan Tunjangan ASN yang harus di bayarkan tepat waktu.

Pada program ini tidak terdapat kendala yang memberatkan karena program ini berisi kebutuhan pokok kantor dan harus terpenuhi tepat waktu.

c. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Pada Triwulan keempat kinerja Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, secara serapan keuangan telah mencapai lebih dari 99,97 % begitu juga target pelayanan perijinan dan perijinana Non Usaha, juga kegiatan Kewenangan Lain yang di limpahkan kepada camat, juga telah tercapai sesuai perencanaan bahkan melebihi target, khusus Sub Kegiatan kewenangan lain yang di limpahkan kepada camat, targetnya adalah lembar SPPT BPP yang tersalurkan kepada wajib pajak yang pada triwulan pertama telah tercapai targetnya, akan tetapi untuk pembayaran SPPT PBB belum tercapai masih terdapat beberapa wajib pajak yang belum membayar SPPT PBB.

Kelemahan :

Pada program ini pelaksanaan kegiatan, pada Sub Kegiatan Kewenangan lain yang di limpahkan , yaitu terkait sosialisasi pembayaran SPPT PBB dan sudah didistribusikan pada triwulan pertama dan pembayaran masih belum memenuhi target tepat waktu, di karenakan

1. banyak tanah yang sudah di jual belikan akan tetapi tidak lapor kepada Kelurahan atau Desa., dan pemilik tanah sudah ganti orang lain, sehingga sulit di temukan pemilik wajib pajak yang sebenarnya.
2. Terdapat wajib pajak yang jauh dari lokasi minta di bayarkan dulu kepada petugas SPPT PBB tapi tidak di ganti, akhirnya tidak di bayarkan tahun - tahun berikutnya.
3. Wajib Pajak yang bandel, belum menyadari kewajibannya untuk membayar pajak

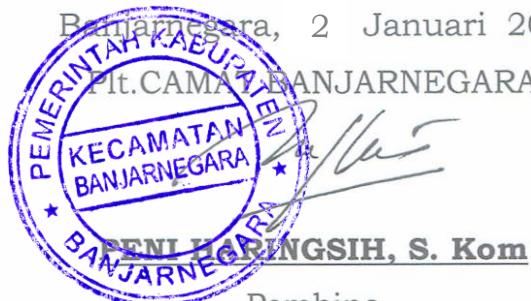
Upaya yang dilakukan :

Atas kendala tersebut maka di harapkan BPPKAD selaku Dinas yang menangani pendapatan daerah dari Pajak semua pihak untuk memberikan sosialiasi terkait :

1. Kesadaran masyarakat terkait wajib pajak, dan kemudahan proses mutasi SPPT PBB, serta kemudahan lain yang bisa membayar pajak Bumi dan Bangunan secara online, sehingga mempermudah bagi wajib pajak yang berada di luar daerah.
2. BPPKAD memberikan teguran secara tertulis kepada wajib pajak yang tidak membayar pajak untuk melakukan pendekatan – pendekatan yang baik guna mencari jalan keluar , agar wajib pajak menyadari akan kewajibanya sebagai wajib pajak.
3. Petugas distribusi SPPT PBB untuk terus memberikan pemahaman terkait kesadaran membayar pajak, dengan membuat target , untuk mengukur tingkat keberhasilan.

Banjarnegara, 2 Januari 2025

Plt. CAMAT BANJARNEGARA



Pembina

NIP. 19690302 199903 2 002